



**PAKET NOVEMBER (PAKNOV 1978): KEBIJAKAN
DEVALUASI RUPIAH TAHUN 1978 SEBAGAI UPAYA
PENDORONG EKSPOR NONMIGAS INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Dicky Dwi Chandra
NIM 13030114120016**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Dicky Dwi Chandra menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 10 Juni 2020

Penulis,

Dicky Dwi Chandra

NIM 13030114120016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“One day you will look back on when you were depressed, struggling with anxiety, or times just weren’t so great and you will thank yourself for not giving up because of how fucking amazing your life is now”

(Grayson Dolan)

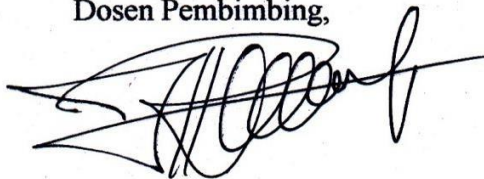
Dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua, kakak, sahabat, dan teman,

Departemen Sejarah

FIB UNDIP

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Haryono Rinardi', written in a cursive style.

Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.

NIP 196703111993031004

Skripsi dengan judul “Paket November (PAKNOV 1978): Kebijakan Devaluasi Rupiah Tahun 1978 Sebagai Upaya Pendorong Ekspor Nonmigas Indonesia” yang disusun oleh Dicky Dwi Chandra NIM (13030114120016) telah diterima dan disahkan oleh panitia program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari,

Ketua,



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.

NIP. 196005151985031004

Anggota I,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.

NIP. 196703111993031004

Anggota II,



Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.

NIP. 196705281991032001

Mengetahui,
Dekan,



The official stamp of Universitas Diponegoro is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI" at the top and "UNIVERSITAS DIPONEGORO" at the bottom. Inside the ring, there is a central emblem featuring a stylized figure. Below the emblem, the text "FAKULTAS ILMU BUDAYA" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Nurhayati, M. Hum.
NIP 19661004199001200

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Paket November (PAKNOV 1978): Kebijakan Devaluasi Rupiah Tahun 1978 Sebagai Upaya Pendorong Ekspor Nonmigas Indonesia”. Pemilihan tema ini juga dilakukan karena penulis menaruh minat terhadap kajian kebijakan ekonomi yang berperan besar terhadap aspek perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan di bidang ekonomi yang belum terselesaikan dan perlu mendapatkan perhatian yang besar guna mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lebih lanjut, skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Strata-1 pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si. selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si., Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang hebat, Bapak Sutrisno dan Ibu Endah Budiyan, serta kakak penulis Kartika Eka Macalosa yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat di Departemen Sejarah 2014 yang sangat luar biasa memberikan dukungan dan bantuan selama berada di lingkungan Departemen Sejarah. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan orang terdekat, Alifiansyah Deto Rahmana Putra, Danang, Muhamad Syahrianto Rachmadi, Yeti Kusuma, Siti Ulin Nuha, Casey Cannythea dan Try Yuwono, yang selalu ada dalam memberikan motivasi dan pemberi semangat yang besar, sejak awal penulisan skripsi ini hingga penulis menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Oleh karena itu, meskipun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 10 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISTILAH	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KONDISI EKONOMI INDONESIA MENJELANG KEBIJAKAN DEVALUASI 1978	15
A. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pada Masa Repelita II	15
B. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia.....	23
C. Perkembangan Harga Minyak	29
D. Neraca Pembayaran Indonesia Pra Devaluasi	32
BAB III KEBIJAKAN DEVALUASI 1978	38
A. Background Devaluasi	38
B. Tujuan Devaluasi.....	43
C. KNOP 15 1978	51
D. Peraturan Pendukung KNOP 1978.....	53

BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN DEVALUASI 1978.....	57
A. Pengaruh Devaluasi Terhadap Ekspor Nonmigas	57
B. Dampak Terhadap Ekonomi Makro	63
C. Perubahan Harga Sektor Nonmigas Pasca Devaluasi 1978	66
D. Nilai Tukar Rupiah Setelah Devaluasi 1978	73
BAB V SIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nation</i>
BIES	: <i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i>
BI	: Bank Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
KIK	: Kredit Investasi Kecil
KNOP	: Kebijakan Nopember
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LNG	: <i>Liquefied Natural Gas</i>
MIGAS	: Minyak dan Gas
MPR	: Majelis Perwakilan Rakyat
NTN	: Nilai Tukar Nominal
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PAKNOV	: Paket November
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PJPT	: Pembangunan Jangka Panjang Tahap
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR ISTILAH

<i>Broad Money</i>	: Jumlah uang yang beredar dalam arti luas.
Defisit	: Berkurangnya kas dalam keuangan.
Devaluasi	: Menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.
Devisa	: Merupakan sejumlah emas atau valuta asing yang biasa digunakan untuk transaksi pembayaran luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Ekspor	: Penjualan barang atau komoditi ke luar negeri.
Impor	: Mendatangkan barang atau komoditi dari luar negeri.
Inflasi	: Proses meningkatnya harga secara umum dan terjadi terus menerus.
Konservatif	: Mempertahankan keadaan atau kebiasaan yang berlaku.
<i>Oil Bloom</i>	: Ledakan ekonomi pada sektor migas.
<i>Oil Shock</i>	: Krisis minyak terjadi di dunia akibat dari penurunan produksi minyak setelah revolusi Iran.
<i>Oil Glut</i>	: Kondisi ketika persediaan minyak dunia kelebihan produksi.
Moneter	: Proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu.
Resesi	: Kondisi ketika PDB menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif lebih dari satu tahun.
Surplus	: Jumlah yang melebihi hasil biasanya.

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
2.1 Perkembangan Persentase Nilai Ekspor Indonesia 1971-1978.....	24
2.2 Impor Barang Modal, Konsumsi, dan Bahan Baku Penolong Indonesia.....	25
2.3 Impor Menurut Penggunaannya 1974-1976.....	26
2.4 Jumlah Produksi Minyak Indonesia 1969-1979.....	29
2.5 Persediaan Devisa Indonesia 1976-1980.....	32
2.6 Neraca Pembayaran Indonesia 1974-1979.....	32
3.1 Tingkat Inflasi, Pertumbuhan PDB, dan Pengeluaran Pemerintah.....	56
4.1 Nilai dan Volume Ekspor Komoditi Kayu.....	76
4.2 Nilai dan Volume Ekspor Komoditi Karet.....	77
4.3 Nilai dan Volume Ekspor Komoditi Kopi.....	78
4.4 Neraca Pembayaran Indonesia 1977-1980.....	80
4.5 Neraca Perdagangan Indonesia 1977-1981.....	82
4.6 Neraca Pembayaran Indonesia 1978-1982.....	83
4.7 Kenaikan Harga BBM di Indonesia 1978-1980.....	85
4.8 Kenaikan Harga Beberapa Macam Beras di Jakarta 1978-1980.....	86
4.9 Perubahan Kurs Mata Uang Asing di Bank Indonesia.....	92

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Paket November (PAKNOV 1978): Kebijakan Devaluasi Rupiah Tahun 1978 Sebagai Upaya Pendorong Ekspor Nonmigas Indonesia” ini mengkaji tentang suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dengan menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing pada 1978. Permasalahan yang hendak diteliti adalah, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia menjelang devaluasi 1978, bagaimana kebijakan devaluasi 1978 dilakukan oleh Pemerintah, dan apa saja faktor dan dampak dari kebijakan devaluasi terhadap perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah ekonomi. Sumber yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber dari surat kabar, laporan pembukuan Bank Indonesia dan jurnal BIES.

Paket November kebijakan devaluasi di Indonesia 1978, merupakan langkah Pemerintah untuk melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Pada periode sebelum Pemerintah melakukan kebijakan devaluasi 1978 kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Dengan sektor migas sebagai penghasil devisa utama, akan tetapi Pemerintah ingin mendorong sector non-migas untuk menjadikannya sumber pendapatan devisa bagi negara. Dalam skripsi ini dibagi dalam tiga periode, yang pertama periode sebelum devaluasi 1978 dilakukan. Periode 1976-1977, periode ini meliputi kondisi perekonomian Indonesia menjelang devaluasi 1978. Periode berikutnya ketika devaluasi 1978 dilakukan, pada periode ini berisi mengenai alasan Pemerintah melakukan devaluasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Periode ketiga adalah setelah devaluasi 1978, yang terjadi pada 1979 hingga 1980an. Pada periode itu, dijelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan devaluasi 1978 bagi perekonomian Indonesia, mengenai perubahan harga di pasaran baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, munculnya komoditi baru di Indonesia serta beralihnya sektor ekspor Indonesia dari bahan mentah ke bahan hasil industri dan perubahan kurs mata uang rupiah.

Kebijakan devaluasi 1978, selanjutnya membawa dampak bagi masyarakat dan Pemerintah. Dampak positif dari kebijakan itu, munculnya komoditi ekspor baru setelah devaluasi 1978, Pemerintah tidak lagi bergantung pada ekspor migas. Dengan adanya kebijakan itu berdampak negatif juga, pada barang-barang impor Indonesia yang mengalami kenaikan harga di pasaran, beberapa barang impor yang mengalami kenaikan itu adalah bahan kebutuhan pokok masyarakat.

ABSTRACT

The thesis titled "Paket November (PAKNOV 1978): Kebijakan Devaluasi Rupiah Tahun 1978 Sebagai Upaya Pendorong Ekspor Nonmigas Indonesia" is reviewing a policy taken by the Government by lowering the value of country's currency towards foreign currency in 1978. The problem studied in this paper are how the Indonesia's economic condition before the 1978 devaluation, how the 1978 devaluation policy done by the Government, and what factors and impacts of the devaluation policy. The methods used in this thesis is historical method consisting heuristics, criticism, interpretation and historiography. The approach used in this paper is an economic history approach. The sources used in this thesis are sources from newspapers, Bank Indonesia accounting reports and BIES journals.

The November 1978 devaluation policy package is a step taken by the Government to intervene country's currency value, so that the value remains stable. In the period before the 1978 devaluation policy applied, the Indonesia's economic condition is in good condition. The oil and gas sector become he major foreign exchange producer, however, the government wants to encourage other non-oil sectors to make it a source of foreign exchange income for the country. The problems in this paper are explained into three periods, the first period is the period before the 1978 devaluation which are 1976-1977. These periods cover the Indonesia's economic condition towards the 1978 devaluation. The next period is the 1978 devaluation. This period explains the reasons why the government devaluates and the driving factors of devaluation policy. The third period is post-devaluation condition which occurred in the 1979 until the 1980s. This period explains about the impact of the 1978 devaluation for the Indonesian economy, regarding the price changes both in the domestic good markets and foreign markets, the emergence of new commodities in Indonesia and the shifting of Indonesian export sector from raw materials to industrial materials and changes in the exchange rate of rupiah.

The 1978 devaluation policy has further impact to the community and the government. The positive impacts of the 1978 devaluation policy are the emergence of new export commodities, the government no longer relies on oil and gas exports. There are also negative impacts of the 1978 devaluation. Imported goods' price are rising in the market which some of them are the basic needs of the people.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kajian tentang sejarah ekonomi Indonesia sudah banyak dilakukan, namun yang telah banyak dilakukan seperti kajian ekonomi perkebunan¹ dan kredit² misalnya, akan tetapi belum banyak yang mengkaji tentang persoalan moneter Indonesia pada tahun 1978 khususnya mengenai kebijakan devaluasi mata uang Rupiah, karena yang ada hanya membahas tentang persoalan moneter Indonesia sampai tahun 1965, oleh karena itu penulis memilih untuk mengkaji tentang kebijakan devaluasi di Indonesia tahun 1978.

Kajian historis tentang moneter Indonesia, khususnya devaluasi selama masa Orde Baru menarik karena dua hal. Pertama, terdapat kecenderungan interval waktu devaluasi semakin pendek. Kedua, melalui kebijakan devaluasi mata uang rupiah nilainya terus mengalami penurunan. Kondisi itu secara tidak langsung menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Selama pemerintahan Orde Baru telah dilakukan empat kali devaluasi, yaitu 23 Agustus 1971 (9,8%), 15 November 1978 (50,6%), 30 Maret 1983 (38,1%) dan 12 September 1986 (45,0%).³ Kebijakan devaluasi merupakan suatu kondisi penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kondisi itu mengakibatkan, harga barang impor menjadi naik. Dengan adanya kebijakan itu, diharapkan impor dapat dikurangi karena harga barang impor menjadi mahal. Sebagai akibatnya masyarakat membutuhkan uang yang lebih banyak untuk membelinya. Pada ujungnya barang-barang impor tidak mampu bersaing dengan barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri.

¹Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial – Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991).

²Haryono Rinardi, “Kredit untuk Rakyat: Kebijakan Kredit Kecil Perbankan untuk Usaha Kecil dan Menengah 1904-1990”, (Disertasi pada Ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada).

³Priasmoro Prawiroardjo, “Arti Devaluasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Bisnis”, (Laporan Penelitian Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, 1986/1987), hlm. 1.

Devaluasi pada dasarnya merupakan *barrier* atau pembatas bagi impor yang berlebihan di dalam negeri. Devaluasi bukan satu-satunya *barrier* yang dapat digunakan untuk membatasi impor dari negeri lain. Kebijakan yang hampir sejenis adalah kuota impor atau pembatasan yang merupakan salah satu kebijakan perdagangan proteksionis yang bertujuan melindungi produk-produk dalam negeri atau industri baru supaya dapat bersaing dengan produk asing. Di sisi lain, ada juga kebijakan anti dumping, kebijakan ini merupakan praktek menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar dalam negeri (harga normal).⁴

Devaluasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan Pemerintah untuk menurunkan kurs mata uang negara tersebut terhadap valuta asing dengan tujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan, atau meningkatkan kinerja neraca perdagangan tersebut, melalui penerimaan ekspor dan menurunkan pengeluaran impor.⁵ Mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri hal ini dapat dicapai karena nilai barang impor menjadi lebih mahal dibanding barang lokal, atau domestik. Dengan tercapainya kesetimbangan *balance of payment* diharapkan nilai kurs valuta asing dapat menjadi relatif stabil.

Volume ekspor pada sisi lain diharapkan dapat meningkat seperti pendapatan dari bea masuk, harga barang dan produk dalam negeri, sekitar periode 1973 hingga 1978 sektor perekonomian Indonesia masih ditopang oleh migas. Kondisi impor pada 1976 meningkat di kisaran angka US\$6,414 dan pada 1978 menjadi US\$6,698. Selama periode 1976-1978 dengan demikian, angka impor Indonesia terus meningkat. Kondisi perekonomian Indonesia pada 1973 masih ditopang oleh sektor migas, produksi minyak Indonesia meningkat 70% antara 1971 dan 1972. Keadaan itu masih ditambah dengan meningkatnya harga minyak internasional yang naik hingga 27% pada 1973. Bersamaan dengan itu, ekspor komoditi non-

⁴Elips, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Balai Pustaka 1997), Hlm 105.

⁵Endang Sih Prapti, "Pendekatan Marshall Learner dalam Analisis Dampak Devaluasi Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia: Kasus Devaluasi 1978" (Laporan Penelitian Dosen pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990).

migas dan tanaman tradisional tetap konstan atau bahkan menurun.⁶ Kondisi itu dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia sangat tergantung kepada sektor migas. Suatu kondisi yang membahayakan ekonomi nasional, karena hanya bertumpu pada satu sektor saja.

Indonesia sebagai negara penghasil minyak selama periode 1970an menikmati harga minyak yang meningkat karena perang Arab-Israel. Bersamaan dengan itu, pada 1970 hasil produksi minyak mencapai puncaknya yaitu sebesar 27% di atas hasil produksi 1967 (pertumbuhan mencapai laju 8,5% setahun) dan 46% di atas hasil produksi tahun 1960. Secara keseluruhan produksi minyak bumi tumbuh rata-rata 17% dari 1971 sampai 1974. Angka pertumbuhan minyak bumi kembali meningkat selama periode 1974-1977, meskipun lebih rendah dibanding periode sebelumnya, yaitu hanya 6,5% per tahun.⁷ Kondisi ekonomi yang seperti di atas, yaitu dengan adanya harga minyak bumi yang tinggi, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, seharusnya Pemerintah tidak melakukan devaluasi mata uang rupiah dalam periode waktu tersebut.

Dasar utama tindakan devaluasi pada negara yang sedang berkembang adalah defisit neraca pembayaran, yaitu defisit yang terjadi akibat peraduan permintaan dan penawaran devisa. Kajian mendalam mengenai hubungan defisit neraca pembayaran dan devaluasi mata uang membutuhkan analisis terhadap faktor penyebab, guna menentukan sifat defisit. Kondisi itu disebabkan karena, tidak setiap defisit neraca pembayaran mengakibatkan devaluasi. Ketidakseimbangan neraca pembayaran bisa terjadi baik dalam sumber penerimaan maupun pengeluaran negara. Ekspor misalnya, dapat mengalami kemunduran karena bersaing dengan barang-barang sintetis atau bertambahnya konsumsi dalam negeri pada barang-barang ekspor yang bersangkutan.⁸ Dalam kaitan itu, tujuan utama kebijakan devaluasi ialah untuk merangsang perluasan ekspor akibat penerimaan

⁶Stephen Grenville, “*Survey of Recent Developments*” dalam BIES No. 1, (Canberra: Australian National University, Maret 1973), hlm. 14-17.

⁷David O. Dapiece, “Tinjauan Umum Ekonomi Indonesia” dalam Gustaf F. Papanek (editor), *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 24.

⁸H.M.T Oppusunggu, *Kebijaksanaan Devaluasi di Indonesia Sebuah Aplikasi Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Sinar Harapan 1983), hlm. 12.

yang bertambah dari para eksportir, sedangkan impor yang bertambah mahal akibat kenaikan kurs diharapkan menurun hingga akhirnya defisit neraca pembayaran bisa berkurang atau beralih menjadi surplus dan persediaan devisa bertambah kuat. Diagnosis keadaan perekonomian dan neraca pembayaran perlu dijalankan sebelum menjalankan kebijakan devaluasi.

Dengan kondisi permasalahan di atas terutama dalam penelitian pada skripsi ini bagaimana hubungan antara kondisi perekonomian Indonesia menjelang kebijakan devaluasi 1978 dan kebijakan devaluasi rupiah tahun 1978. Dengan permasalahan seperti di atas, muncul beberapa pertanyaan penelitian yang harus dijawab, yaitu:

1. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia menjelang kebijakan devaluasi 1978?
2. Bagaimana kebijakan devaluasi 1978 di Indonesia dijalankan?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan devaluasi 1978?

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian dapat lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.⁹ Dalam penelitian sejarah dikenal tiga ruang lingkup, yaitu temporal (waktu), spasial (wilayah) dan keilmuan.

Lingkup temporal skripsi ini adalah mulai pada awal tahun 1978 sampai dengan akhir 1982. Pemilihan tahun 1978 dijadikan awal kajian dengan alasan bahwa tahun tersebut merupakan tahun terjadinya peristiwa paket November kebijakan di Indonesia. Tahun 1982 menjadi akhir dari penelitian ini, karena masa itu Indonesia merasakan dampak periode resesi ekonomi, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan.¹⁰

Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah nasional, yaitu ekonomi Indonesia. Hal itu disebabkan topik skripsi ini tentang Paket November (PAKNOV 1978) yaitu

⁹Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

¹⁰Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 19.

suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1978, sehingga bersifat nasional. PAKNOV merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang moneter hingga berlaku dan berdampak bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Lingkup keilmuan pada penelitian ini adalah sejarah ekonomi. Sejarah yang akan dibahas mengenai masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Kajian ilmu sejarah ekonomi menitik beratkan pada permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ilmu ekonomi mempelajari persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan usaha manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sarana (sumber daya) yang terbatas.¹¹ Penggunaan teori ekonomi secara lebih sistematis besar kemungkinan akan menghasilkan wawasan baru, meskipun kadang-kadang kontroversial.¹²

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk tiga hal, yaitu: Pertama memberikan gambaran kondisi perekonomian di Indonesia menjelang kebijakan devaluasi 1978 pada masa Repelita II. Kedua menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana paket November kebijakan devaluasi mata uang Rupiah di Indonesia tahun 1978 dijalankan oleh Pemerintah dalam konteks sejarah perkembangan ekonomi. Ketiga, mengkaji dampak dari kebijakan devaluasi 1978 terhadap ekspor nonmigas Indonesia.

Penelitian ini penulis menjelaskan mengenai apakah dasar utama tindakan peristiwa paket November kebijakan devaluasi 1978 di Indonesia, Biasanya titik tolak bagi devaluasi adalah defisit neraca pembayaran, yaitu defisit yang terjadi akibat peraduan permintaan dan penawaran devisa. Kondisi itu, untuk menentukan

¹¹T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 15.

¹²Anne Booth, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988).

sifat defisit perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya, sebab tidak setiap defisit terjadi devaluasi.¹³

D. Tinjauan Pustaka

Penulis dalam skripsi ini, melakukan tinjauan terhadap beberapa pustaka. Pertama yaitu kajian mengenai tema sejarah ekonomi. Tinjauan pustaka pada skripsi ini diawali dengan sebuah karya buku yang berjudul “Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950an-1990an” yang ditulis oleh Thee Kian Wie.

Dalam bukunya, Thee Kian Wie yang berjudul “Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950an-1990an” manfaat buku ini dalam penulisan skripsi adalah memberikan gambaran kepada penulis untuk menjelaskan perkembangan sejarah ekonomi dari masa Orde Lama, Reformasi hingga pada Orde Baru secara objektif dan detail. Thee Kian Wie selain menghimpun artikel-artikel itu dalam satu buku, Dr.Thee juga memberi pengantar mengenai perkembangan ekonomi Indonesia selama masa pascakolonial, yang memungkinkan pembaca memahami konteks dimana orang-orang tersebut berperan. Buku itu, juga banyak memuat pelajaran yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan lainnya yang sekiranya akan, mempengaruhi jalannya pengambilan kebijakan apabila menyimak dengan sungguh-sungguh. Buku ini dengan demikian dapat membantu para ahli dan penulis yang mempelajari kondisi ekonomi Indonesia, memahami berbagai gagasan dan realitas politik yang telah mempengaruhi berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pada masa itu.

Buku kedua adalah sekumpulan artikel ilmiah yang disunting oleh Anne Booth yang berjudul *Ekonomi Orde Baru*. Buku yang disunting oleh Anne Booth ini sesungguhnya merupakan bunga rampai mengenai kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah pada masa Orde Baru. Artikel-artikel yang dimuat dalam buku itu ditulis oleh para ekonom, bukan sejarawan. Buku ini sesungguhnya merupakan kajian tentang kebijakan ekonomi, bukan karya sejarah. Hal itu,

¹³H.M.T Oppusunggu, *Kebijaksanaan Devaluasi di Indonesia Sebuah Aplikasi Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Sinar Harapan 1983), hlm. 12.

disebabkan artikel itu berasal dari seminar mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia sejak 1960, karena para penulis dalam buku ini merupakan ahli pada bidang mereka masing-masing, dan tulisan mereka didasarkan atas pengetahuan tangan pertama mereka mengenai Indonesia. Buku ini bersifat objektif karena buku ini merupakan kajian ekonomi dan buku ini dapat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terdapat sebelas artikel dalam buku itu, tetapi hanya empat yang sesuai dengan penelitian ini. Empat artikel itu antara lain, adalah yang pertama Anne Booth dan Peter McCawley, *Perekonomian Indonesia Sejak Pertengahan Tahun Enampuluhan*.¹⁴ Stephen Grenville, *Kebijaksanaan Moneter dan Sektor Keuangan Formal*¹⁵, Anne Booth dan Peter McCawley *Kebijaksanaan Fiskal*¹⁶ dan yang terakhir Phyllis Rosendale tentang *Neraca Pembayaran*.¹⁷

Buku tersebut merupakan kajian politik ekonomi, karena membahas berbagai kebijakan ekonomi Indonesia selama masa Orde Baru. Dengan membaca buku itu dapat diketahui persoalan tentang kebijakan fiskal, neraca pembayaran, dan persoalan moneter Indonesia. Hal yang menarik adalah para penulis artikel dalam buku itu, mencantumkan data-data statistik untuk mendukung argumennya. Itu merupakan salah satu kelebihan buku tersebut. Oleh karena kajiannya berasal dari awal periode 1970-an, data-data dan argumen yang dibangun dalam buku tersebut sangat berguna untuk karya sejarah yang mengkaji mengenai masalah ekonomi Orde Baru.

Pustaka ketiga, adalah tesis yang berjudul “Pembangunan Ekonomi dan Struktur Politik Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru: Pilihan Strategi dan

¹⁴Anne Booth dan Peter McCawley, “Perekonomian Indonesia Sejak Pertengahan tahun Enampuluhan” dalam *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

¹⁵Stephen Grenville, “Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan Formal” dalam *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

¹⁶Anne Booth and Peter McCawley, “Kebijakan Fiskal” dalam *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

¹⁷Phyllis Rosendale, “Neraca Pembayaran” dalam *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

Dampaknya” yang disusun oleh Djoko Sulistyو.¹⁸ Serangkaian kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah menyangkut berbagai permasalahan antara lain, pada bidang moneter, fiskal, pertanian, industri, permodalan, dan perdagangan. Semua kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi kebijakan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi.

Penelitian ini menjelaskan tentang masa Orde Baru dalam Repelita I dan Repelita II, tesis ini penting untuk penelitian ini karena di dalam Bab III tesis tersebut membahas tentang keberhasilan dan dampak kebijakan politik ekonomi. Pada bagian yang membahas mengenai keberhasilan dan dampak kebijakan politik ekonomi dijelaskan mengenai dua bahasan pokok. Pertama adalah prestasi yang diperoleh dari pilihan strategi yang diambil oleh Pemerintah namun juga diikuti oleh beberapa akses negatif yang menyangkut rekrutmen politik dan kontrol sosial dari kekuatan-kekuatan politik. Kedua, adanya serangkaian prestasi dari berbagai kebijakan ekonomi yang ditempuh ternyata berhasil memantapkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, namun akses negatif pun muncul terutama menyangkut siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan dari pembangunan ekonomi ini. Pada tahun 1967-1977 perekonomian Indonesia merupakan masa pemulihan setelah sebelumnya perekonomian Indonesia mengalami stagflasi atau bahkan krisis ekonomi yang cukup parah dan selama Repelita I dan II perekonomian Indonesia banyak mengalami perbaikan yang cukup menggembirakan.¹⁹

Karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini dimuat juga dalam jurnal penelitian Wildan Sena Utama yang di unggah pada *Academia.edu*. Membahas mengenai upaya Pemerintah mengenai kebijakan ekonomi luar negeri dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru.

¹⁸Djoko Sulistyو, “Pembangunan Ekonomi dan Struktur Politik Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru: Pilihan Strategi dan Dampaknya” (Tesis pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1992).

¹⁹Pada bulan Agustus 1980 majalah Tempo menyebarkan angket yang berisi pendapat masyarakat mengenai kondisi ekonomi yang dirasakan oleh mereka. Salah satu persyaratannya adalah perbandingan kondisi ekonomi dari rumah tangga mereka dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari 495 responden, 71,8 % menjawab lebih baik dari 15 tahun yang lalu.

Dalam penyusunan penelitian ini, karya Wildan Sena Utama sangat membantu penulis melakukan penulisan tentang Paket November Kebijakan di Indonesia 1978. Karya penelitian ini penting karena memberikan penjelasan dan memiliki kaitan yang memadai mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah pada 1950an-1980an untuk memperdalam analisis penelitian ini. Memasuki periode 1970, Pemerintah merancang sebuah rencana pembangunan lima tahun atau Repelita. Tujuan dari rencana pembangunan ini adalah membangun sarana dengan bantuan asing, meningkatkan produksi pangan khususnya beras dan perluasan produksi dengan bantuan luar negeri terutama pada sektor pertambangan dan manufaktur. Kebijakan untuk meningkatkan produksi beras ternyata berhasil dengan penerapan teknologi dalam pertanian.²⁰

Ekonomi Indonesia pada 1970 sudah pulih dari krisis. Kebijakan ekonomi luar negeri Orba banyak berperan penting dalam mengembalikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan GDP tumbuh rata-rata 5,0% dalam kurun 1965-1970. Di bidang pertanian pertumbuhan tahunan rata-rata 3,2% naik dari 1,4% pada periode 1960-1965, sedangkan pada bidang industri dan jasa pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,8% dan 5,3% naik dari sekitar 1,7% dan 3,0% dari periode 1960-1965. Pertumbuhan produksi beras meningkat sebesar 4,5% dalam kurun 1969 dan 1973.²¹

²⁰Wildan Sena Utama, "Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia dan Dampaknya Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia 1950an-1980an" (https://www.academia.edu/12958952/Kebijakan_Ekonomi_Luar_Negeri_Indonesia_dan_Dampaknya_Bagi_Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_1950an-1980an, diunduh pada 18 Juli 2018).

²¹L.A. Mears dan S. Moeljono, "Kebijaksanaan Pangan", dalam Anne Booth dan Peter McCawley, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1982), Hlm. 47.

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan digunakan dalam membuat analisis itu. Sejarah ekonomi merupakan sejarah yang membahas tentang berbagai masalah perekonomian Indonesia yang secara luas diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya.

Sejarah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena ekonomi yang berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, metode statistik dan teori ekonomi terapan sampai peristiwa bersejarah. Topik ini meliputi sejarah bisnis, sejarah keuangan dan mencakup bidang sejarah sosial seperti sejarah kependudukan dan sejarah buruh. Sejarah ekonomi kuantitatif (ekonometrik) juga disebut sebagai kliometrik.²²

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (*economic policy*) adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang mau dicapai telah ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN, yang dapat diringkas dalam “trilogi pembangunan”: kestabilan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.²³ Paket Kebijakan adalah suatu alokasi atau sekumpulan kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam suatu tempo waktu di bidang ekonomi dengan tujuan untuk menaikan taraf kondisi perekonomian suatu negara.

Devaluasi mata uang suatu negara adalah kebijakan menurunkan kurs mata uang negara tersebut terhadap valuta asing dengan tujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan, atau meningkatkan kinerja neraca perdagangan negara tersebut, melalui peningkatan penerimaan ekspor dan menurunkan pengeluaran

²²Robert Whaples, *Cliometrics* dalam Steven Durlauf and Lawrence Blume, *The New Palgrave Dictionary of Economics* (2nd ed. 2008).

²³T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), Hlm. 225.

impor.²⁴ Devaluasi tersebut biasanya dilakukan apabila rezim yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap tersebut menilai bahwa harga mata uangnya dinilai terlalu tinggi dibandingkan nilai mata uang negara lain yang mana nilai mata uang tersebut tidak didukung oleh kekuatan ekonomi negara yang bersangkutan.

Mata uang suatu negara dikatakan mengalami kelebihan nilai dapat dilihat dari perbedaan inflasi kedua negara. Negara yang inflasinya tinggi seharusnya akan segera mengalami penurunan nilai namun dalam sistem nilai tukar tetap proses penyesuaian tersebut tidak berlaku secara otomatis karena penyesuaian nilai tukar tersebut harus melalui penetapan pemerintah. Tanda-tanda suatu mata uang yang mengalami kenaikan nilai antara lain ekspor yang terus menurun dan industri manufaktur mulai mengalami penurunan kinerja.

Paket November (PAKNOV 1978): Kebijakan Devaluasi Rupiah Tahun 1978 Sebagai Upaya Pendorong Ekspor Nonmigas Indonesia merupakan skripsi mengenai kebijakan ekonomi moneter pada masa Orde Baru, skripsi ini akan menjelaskan tentang tiga hal yang pertama adalah mengenai kondisi ekonomi Indonesia menjelang kebijakan devaluasi 1978, kedua menjelaskan mengenai bagaimana proses kebijakan devaluasi 1978 dijalankan dan apa saja yang melatar belakangi kebijakan tersebut dijalankan, ketiga dalam skripsi ini menjelaskan mengenai dampak kebijakan devaluasi 1978.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah dapat didefinisikan sebagai bangunan sistematis yang berisi seperangkat prinsip dan aturan yang disusun untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai tersebut ke dalam bentuk tulisan yang ilmiah.²⁵

²⁴Endang Sih Prapti, "Pendekatan Marshall Learner dalam Analisis Dampak Devaluasi Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia: Kasus Devaluasi 1978" (Laporan Penelitian Dosen pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990).

²⁵Gilbert J. Garaghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), Hlm. 33.

Pengertian metode sejarah yang panjang itu mungkin dapat disingkat sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis, dan penulisan (historiografi).

Pertama, heuristik adalah salah satu langkah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam skripsi ini sumber primer berupa surat kabar atau koran yang terbit mulai dari tahun 1977 sampai dengan 1982, Koran yang diambil untuk penulisan skripsi ini adalah Koran Suara Karya yang didapat dari Monumen Pers Nasional di Surakarta, Koran Kompas diperoleh dari Pusat Informasi Kompas Gramedia di Semarang dan Perpustakaan Kota Yogyakarta, surat kabar Suara Merdeka yang diperoleh dari Depo Arsip Suara Merdeka di Semarang, surat kabar Sinar Harapan yang diperoleh di Arsip Dinas Sejarah TNI-AD Bandung.

Alasan penulis mengambil keempat koran tersebut untuk dijadikan sumber primer dari penulisan skripsi ini adalah karena keempat Koran tersebut mencakup berita nasional yang cukup obyektif dan relevan untuk penulisan skripsi ini, Koran Suara Karya dijadikan sebagai sumber karena menurut penulis Koran tersebut dapat mewakili gambaran peristiwa pada masa Orde Baru, seperti yang penulis ketahui bahwa Suara Karya merupakan sebuah Koran milik partai politik yang pro terhadap pemerintahan Orde Baru. Surat kabar Sinar Harapan, Suara Merdeka dan Kompas digunakan untuk sumber penulisan skripsi ini karena koran tersebut memuat berita nasional dan persoalan ekonomi di Indonesia pada saat itu, koran tersebut merupakan sumber primer karena ditebitkan pada periode yang sama dengan kebijakan devaluasi 1978 dilakukan oleh Pemerintah. Manfaat dari sumber yang diperoleh adalah dapat membantu penulis untuk menjelaskan serta memberikan gambaran yang luas mengenai peristiwa Paket November Kebijakan Devaluasi 1978 serta memberikan bukti atau fakta sejarah untuk menyusun skripsi ini.

Sumber primer yang berikutnya adalah Laporan Pembukuan Keuangan BI tahun 1978 yang diperoleh Perpustakaan Bank Indonesia, Pusat Koleksi Bung Hatta, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Institute, Perpustakaan Nasional

Indonesia, Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah LIPI, dan juga Perpustakaan dan Arsip Dinas Sejarah TNI-AD Kota Bandung.

Adapun sumber sekunder yaitu sumber yang tidak berasal dari tangan pertama, yang berupa literatur dan artikel hasil penulisan orang lain di berbagai media yang relevan dengan topik permasalahan. Sumber berupa literatur tersebut diperoleh oleh melalui studi pustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Departemen Sejarah Undip, Perpustakaan Widya Puraya Undip, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Bank Indonesia Semarang.

Kedua, adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menguji sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Pada metode ini, kritik yang dipakai adalah kritik intern. Kritik Intern yaitu kritik terhadap isi sumber untuk menentukan kredibilitas sumber, apakah isinya dapat dipercaya atau tidak.

Ketiga, adalah interpretasi sumber yaitu menghubungkan dan merangkaikan fakta sejarah secara kronologis sehingga mendapat alur cerita yang sistematis melalui penafsiran fakta yang sudah diklarifikasi agar dapat diceritakan kembali. Tahap ini dilakukan dengan membuat hubungan antar fakta yang sudah didapat melalui bantuan imajinasi sehingga terdapat pemahaman terhadap fakta sejarah yang ada.

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah penyajian hasil penelitian sejarah melalui bentuk tulisan. Tahap ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang sudah disintesakan. Dalam tahap ini fakta yang sudah disintesakan kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat di pahami dengan baik oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini mengacu pada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa subbab yang tersusun sebagai berikut,

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Ekonomi di Indonesia Menjelang Kebijakan Devaluasi 1978.

Bab ini akan memberikan gambaran umum kondisi perekonomian di Indonesia pada masa Repelita I dan Repelita II, yang melatar belakangi tindakan kebijakan paket November di Indonesia pada tahun 1978.

Bab III Kebijakan Devaluasi 1978. Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana proses kebijakan devaluasi mata uang di Indonesia dijalankan dan apa saja yang melatar belakangi terjadinya kebijakan devaluasi di Indonesia.

Bab IV Dampak Kebijakan Devaluasi 1978. Pada bab ini akan membahas tentang berbagai dampak yang dapat ditimbulkan terhadap Ekonomi Makro. Akibat dari adanya suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan memberikan berbagai dampak diantaranya dampak bagi ekonomi makro.

Bab V Simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.